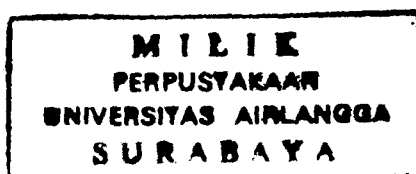


ABSTRAK

Kebijakan komunikasi Surabaya Kota Literasi merupakan kebijakan baru dimana dalam proses implementasinya sangat problematis, baik dari segi pengetahuan, pemahaman dan keajegan tentang kebijakan ini, juga aktor-aktor yang berperan mulai dari sebelum hingga setelah kebijakan ini dibuat, hingga substansi program yang dihasilkan. Selain itu, masih banyaknya sasaran kebijakan yang mengaku tidak mengetahui adanya kebijakan Surabaya Kota Literasi yang telah dicanangkan oleh Walikota Surabaya sejak tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus dengan tipe penelitian deskriptif agar dapat mendeskripsikan implementasi kebijakan Surabaya Kota Literasi oleh Pemerintah Kota Surabaya. Dominasi aktor kunci dalam kebijakan Surabaya Kota Literasi juga menjadi menarik untuk dikaji karena ternyata ada aktor lain yang membuat kebijakan ini muncul dibalik peran Walikota Surabaya. Hasil penelitian ini memperlihatkan adanya keterlibatan Kepala Badan Perpustakaan (Barpus) Kota Surabaya dibalik ide pencanangan Surabaya Kota Literasi membawa alur produksi kebijakan Surabaya Kota Literasi ini bukan didominasi oleh Tri Risma Harini selaku Walikota Surabaya melainkan Kepala Barpus Kota Surabaya, Arini Pakistyaningsih. Kebijakan literasi ini juga tidak memiliki dasar hukum sendiri dan yang lebih menarik adalah dasar hukum yang digunakan didominasi oleh peraturan tentang penyelenggaraan perpustakaan. Kebijakan Surabaya Kota Literasi ini seakan sulit untuk diimplementasikan di Surabaya dilihat dari segi transmisi penyaluran komunikasi, kejelasan komunikasi, konsistensi, ketepatan dan keajegan yang menjadi penghambat terlaksananya kebijakan Surabaya Kota Literasi. Oleh sebab itu, diperlukan perluasan objek literasi yang diterapkan dalam kebijakan Surabaya Kota Literasi yang memang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Surabaya dan kemampuan aparatur pelaksanaannya. Selain itu juga diperlukan pemahaman yang seragam tentang konsep literasi dalam kebijakan Surabaya Kota Literasi dari pusat hingga sasaran akhir agar tidak terjadi kesenjangan pada pelaksanaannya.

Kata kunci : kebijakan komunikasi, Surabaya Kota Literasi, implementasi kebijakan.



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Studi Kebijakan Komunikasi Pada Kebijakan Surabaya Kota Literasi Oleh Pemerintah Kota Surabaya” ini sebagai syarat kelulusan sebagai mahasiswa Departemen Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya.

Terima kasih tak lupa penulis tujukan kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini. Peneliti berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Surabaya, 17 Desember 2015

Peneliti